

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan dewasa ini semakin mengalami perkembangan dan peningkatan yang sangat luar biasa. Berbagai cara dan strategi dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai “suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian utama”.¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

Pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Dari kedua pengertian tersebut, pendidikan pada dasarnya menginginkan peserta didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya, baik sebagai hamba Allah, sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

¹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), h. 19.

²Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, “Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 5.

Agama Islam pun menuntut umatnya untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang mendukung untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hal ini dapat dipahami dari ayat pertama dalam Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Surat Al-'Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Secara harfiah kata *qara'a* yang terdapat pada ayat tersebut berarti menghimpun huruf-huruf dan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya dan membentuk suatu bacaan.³ Menurut M. Quraish Shihab, “kata *iqra'* atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW”.⁴

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perintah membaca dalam ayat tersebut merupakan perintah yang sangat penting diberikan kepada umat manusia, sehingga kata tersebut diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama.⁵ Kata membaca meliputi kegiatan yang sangat luas, yaitu membaca ayat-ayat Allah yang tertulis sebagaimana Al-Qur'an, dan dapat pula berupa ayat-ayat Allah yang tidak tertulis seperti yang terdapat pada alam raya

³Al-Râghibal-Asfahânî, *Mufradât Al-Fâzh al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th), h. 414.

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 167.

⁵*Ibid.*

dengan segala hukum kausalitas yang ada di dalamnya, dan pada diri manusia.

Membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dapat menghasilkan ilmu-ilmu agama Islam seperti *Tauhid, Fiqih, Akhlak, Tarikh* dan sebagainya. Sedangkan membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta dapat menghasilkan *sains* seperti *Biologi, Fisika, Astronomi, Geologi* dan sebagainya. Adapun mempelajari ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri manusia bisa dipandang dalam berbagai aspek, aspek fisik menghasilkan *sains* seperti kedokteran dan ilmu tentang raga, dan dari aspek tingkah laku dapat menghasilkan *Ilmu ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi* dan sebagainya, dan dari segi kejiwaan dapat menghasilkan *Psikologi*.⁶

Sisi lain, setiap individu khususnya di Indonesia dituntut untuk memiliki pengetahuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 telah ditegaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷

⁶H. Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawiy)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 44.

⁷Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, "Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan", h. 8-9

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan program pendidikan yang matang yang disusun sesuai tujuan pendidikan. Program pendidikan yang dimaksud ialah kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.⁸ Kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan.⁹

Kurikulum selain mengacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat.¹⁰ Indonesia yang terdiri lebih dari 3500 pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan mempunyai berbagai macam adat-istiadat, bahasa, kebudayaan, agama, kepercayaan, dan sebagainya merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keanekaragaman tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan. Untuk itu perlu ada

⁸H, Dakir, *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 3.

⁹Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 59.

¹⁰H, Dakir, *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, h, 100.

kebijakan kurikulum yang bisa melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur atau kekhasan suatu daerah. Disinilah perlu adanya kurikulum muatan lokal.

Kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.¹¹

Dalam pengertian lain, kurikulum muatan lokal ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹²

Dalam kaitannya dengan kurikulum muatan lokal ini, Kalimantan Selatan yang penduduknya lebih dari 97,88% beragama Islam¹³ disadari oleh pemerintahnya perlu pengembangan pendidikan Al-Qur'an di daerah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu adanya peningkatan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di daerah ini, sehingga Pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan

¹¹*Ibid.*, h. 102.

¹²Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum: Konsep Teori, Prinsip, Prosedur, Komponen, Pendekatan, Model, Evaluasi & Inovasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 205.

¹³Data dari Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan tentang Tabel Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Prosentasi Menurut Kab/Kota Tahun 2012.

sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nabi Muhammad SAW. telah memberikan motivasi kepada umat Islam dengan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW. melalui Abî 'Abdurrahmân al-Sulamîy dari 'Utsmân:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (رواه البخارى) ¹⁴

Bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendidikan Al-Qur'an secara sistematis, terarah dan berkesinambungan adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 disebutkan: "Pendidikan Al-Qur'an ialah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan,

¹⁴Al-Imâm Abî 'Abdillâh bin Ismâ'il al-Bukhâriy, *Ṣaḥîḥ al-Bukhâriy*, (Beirût: Dâr Ibnu Kaśîr, 2002M/1423H), h. 1283-1284.

memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an".¹⁵ Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 ditegaskan: "Materi pendidikan Al-Qur'an merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal".¹⁶

Sebuah gagasan pemerintah yang mulia ini hendaknya menjadi perhatian penuh oleh segenap penduduk muslim, karena gagasan ini sangat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyuruh orang-orang beriman untuk selalu mentaati Allah dan Rasulullah serta pemimpin (pemerintah yang baik) sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Rasulullah SAW. menegaskan agar kaum muslimin selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah supaya selalu dalam keselamatan dalam mengarungi kehidupan ini. Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁷

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, lembaga-lembaga pendidikan yang berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tingkat SD hingga tingkat

¹⁵Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan" Bab I Pasal 1 ayat 4, (Banjarmasin: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, 2009). h. 5.

¹⁶*Ibid.*, Bab I Pasal 6 ayat 1.

¹⁷Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Âmir al-Ashbaḥy al-Madany, *Muwatha' al-Imâm Mâlik*, Tahqîq: Basyâr 'Iwâd Ma'rûf, Mahmûd Khalîl, (Baerut: Muassasah al-Risâlah, 1412H), Juz 2, h. 70.

SMA mempunyai kurikulum muatan lokal yakni Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an. Setiap sekolah harus memasukkan Pendidikan Al-Qur'an sebagai mata pelajaran kurikulum muatan lokal dalam kurikulum sekolah.

Dari sini terlihat adanya hubungan yang erat antara gagasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dengan kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an. H. Lias Hasibuan menegaskan bahwa "... dokumen dari suatu kurikulum mestilah diberlakukan melalui suatu Surat Keputusan pejabat berwenang untuk memberlakukan kurikulum, sehingga kurikulum dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikannya".¹⁸

S. Nasution yang dikutip oleh H. Lias Hasibuan berpendapat bahwa "kurikulum akan berharga jika nilai-nilai dari dokumen kurikulum tersebut dapat direalisasikan dengan program-program pendidikan yang dilaksanakan".¹⁹ Begitu juga dengan kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an ini akan bernilai jika sekolah-sekolah dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan.

Namun dalam pengamatan dan wawancara peneliti dengan sebagian guru Pendidikan Agama Islam SD, SMP dan SMA/SMK Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, peneliti mendapatkan informasi awal adanya perbedaan

¹⁸H. Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 14.

¹⁹*Ibid.*

dalam melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an. Sebagian SD, SMP dan SMA/SMK tersebut ada yang melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an dalam pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, artinya tidak ada jam mata pelajaran tersendiri untuk Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an tersebut. Sebagian SD, SMP dan SMA/SMK yang lainnya melaksanakan dengan jam tersendiri namun mereka tidak mempergunakan kurikulum yang sudah disusun dan ditetapkan, mereka hanya mempergunakan Buku Iqra' dan buku lainnya sehingga mereka tidak menamakan istilah Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an tetapi Mata Pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA). Sebagian pula menggunakan metode Tilawati dan lain-lain yang umumnya dilaksanakan di sejumlah SD Islam. Bahkan sebagian yang lainnya tidak melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an.

Sebagai indikasi adanya perbedaan pelaksanaan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an tersebut bahwa tidak adanya Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Semester (US) baik tingkat gugus, kecamatan atau tingkat kota sebagaimana yang berlaku pada mata pelajaran lainnya yang semuanya disiapkan soal untuk ulangan bersama. Khusus untuk tingkat SMP sebenarnya ada beberapa guru yang ditetapkan MGMP PAI untuk membuat soal bersama, tetapi setiap sekolah diberi kebebasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan soal bersama yang sudah disusun, sehingga sebagian besar sekolah tingkat ini tidak

mempergunakan soal yang sudah disiapkan. Peneliti juga mendapatkan informasi yang tidak terlalu berbeda dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal ini di daerah lain, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Barito Kuala.

Adanya perbedaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an di sekolah-sekolah tersebut tentunya setiap sekolah mempunyai alasan-alasan tertentu. Bagi sekolah yang belum atau tidak melaksanakan mereka beralasan bahwa jam pelajaran di sekolah sudah penuh dengan sejumlah mata pelajaran lain yang sudah ada. Bagi sekolah yang melaksanakan dalam pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam artinya tidak ada jam pelajaran tersendiri untuk Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an mereka beralasan yang sama yakni jam pelajaran di sekolah sudah penuh dengan sejumlah mata pelajaran lain yang sudah ada, hanya saja guru Pendidikan Agama Islam berusaha menyisakan waktu untuk memberikan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an ketika dalam pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun hal ini jelas tidak maksimal, bahkan bisa mengganggu pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam karena alokasi waktu yang tersedia untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum (SD, SMP, SMA/SMK) dinilai masih kurang hanya dua atau tiga jam pelajaran per minggu.

Sebagian sekolah lainnya melaksanakan dengan jam tersendiri namun mereka tidak mempergunakan kurikulum yang sudah disusun dan ditetapkan,

mereka menggunakan Buku Iqra' atau buku-buku lainnya dengan metode-metode yang sesuai dengan buku-buku pegangannya, mereka beralasan bahwa materi kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an yang sudah disusun dan ditetapkan dipandang masih di bawah dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan sekolah-sekolah.

Selain itu, Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an dalam hubungannya dengan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang sudah termasuk dalam kurikulum nasional, dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat SD, SMP dan SMA/SMK standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik meliputi lima aspek yaitu: 1) Al-Qur'an dan Hadis, 2) Aqidah, 3) Akhlak, 4) Fiqih, dan 5) Tarikh dan Kebudayaan. Aspek Al-Qur'an dalam Pendidikan Agama Islam sepertinya terdapat kemiripan dengan rancangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an. Padahal seyogyanya Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an memberikan nilai tambah dari unsur Al-Qur'an dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 ditegaskan: "Materi pendidikan Al-Qur'an merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal".²⁰

Dari adanya perbedaan pelaksanaan di sekolah-sekolah terhadap Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an sebagai esensi penting dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 ini tentunya perlu adanya evaluasi terhadap gagasan Peraturan Daerah Provinsi

²⁰Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan" Bab I Pasal 6 ayat 1

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an. Dan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan pada Bagian Empat: Evaluasi Materi Pelajaran Pendidikan Al-Qur'an pasal 6 disebutkan: "Materi Pelajaran Pendidikan Al-Qur'an dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan setiap 3 (tiga) tahun sekali".²¹

Selain itu, H. Lias Hasibuan berpendapat:

Kurikulum sebagai suatu produk pemikiran sudah barang tentu tidak mungkin dapat diberlakukan sepanjang zaman. Kurikulum selalu mempunyai keterbatasan-keterbatasan menurut ukuran ruang dan waktu ketika kurikulum itu diberlakukan.²²

Begitu juga dengan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an untuk selanjutnya melahirkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan bagian penting dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentu tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dikritisi dan dievaluasi.

Bertitik tolak dari gambaran tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih jauh lagi dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "ANALISIS KRITIS TERHADAP GAGASAN PADA

²¹Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, "Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan", (Banjarmasin: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, 2010), h. 13.

²²H. Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, h. 15.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN DOKUMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN AL-QUR'AN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan dokumen kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis isi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gagasan kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis isi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian mengenai pendidikan khususnya yang terkait dengan gagasan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an yang ideal dan relevan dengan tuntutan zaman dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari khususnya dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan pengembangan kurikulum Pendidikan Al-Qur'an yang efektif dan efisien untuk mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Sebagai acuan dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sampai sejauh mana keefektifan peraturan daerah yang telah dikeluarkan dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan datang.
- c. Bahan pengetahuan bagi peneliti mengenai bagaimana dokumen kurikulum muatan lokal pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009.
- d. Bahan informasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan khususnya mereka yang terlibat dalam masalah ini di dua lembaga tersebut tentang bagaimana isi gagasan kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan isi gagasan kurikulum Peraturan Gubernur Nomor 038 Tahun 2010, dan bagaimana dokumen kurikulum muatan lokal pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, dengan demikian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an pada sekolah-sekolah se-Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang keliru terhadap judul tersebut maka penulis memberikan batasan-batasan istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “analisis” mengandung arti:²³

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- c. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya
- d. penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- e. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

2. Kritis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kritis” mengandung arti:²⁴

- a. bersifat tidak dapat lekas percaya;
- b. bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan;
- c. tajam penganalisan

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 60-61.

²⁴*Ibid.*, h. 761.

3. Gagasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gagasan berarti “hasil pemikiran, ide”.²⁵

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 ialah sebuah peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an yang berlaku untuk sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai tingkat Sekolah Menengah Atas yang berada dalam tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dokumen

Dokumen ialah “sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan”.²⁶

6. Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan,

²⁵*Ibid.*, h. 425.

²⁶*Ibid.*, h. 361.

direncanakan dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.²⁷

7. Muatan Lokal

Muatan lokal ialah mata pelajaran yang berciri khas tertentu, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an.

Jadi yang dimaksud dengan *Analisis Kritis terhadap Gagasan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an* ialah penyelidikan yang mendalam dengan berusaha mendapatkan kekurangan terhadap hasil pemikiran atau ide dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan sesuatu yang tertulis dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini ialah:

- a. Gagasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010
- b. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an meliputi:
 - 1) Latar belakang Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an.
 - 2) Fungsi, maksud dan tujuan serta ruang lingkup Pendidikan Al-Qur'an.

²⁷H, Dakir, *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, h. 3.

- 3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Al-Qur'an.
- 4) Rambu-rambu pengembangan kurikulum Pendidikan Al-Qur'an.
- 5) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Dasar yang terdiri: a) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Dasar, dan b) Materi Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Dasar
- 6) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Pertama yang terdiri: a) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Pertama, dan b) Materi Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Pertama.
- 7) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri: a) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, dan b) Materi Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sebenarnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, peneliti menemukan ada

beberapa skripsi dan tesis, namun beberapa penelitian terdahulu belum ditemukan berupa penelitian kepustakaan.

Pertama, Tesis Saudari Kamaliah yang berjudul : *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Ta'limul Qur'an di SMA Kabupaten Banjar (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Banjar)*. Fokus penelitian ini ialah membahas pengembangan dan implementasi Kurikulum Muatan Lokal Ta'limul Qur'an di SMA Kabupaten Banjar serta faktor pendukung dan penghambat pengimplementasiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif fenomenologis, dan untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang kurikulum muatan lokal yang merupakan bagian dari peraturan daerah, namun penelitian terdahulu ini nama kurikulum muatan lokal dan peraturan daerahnya berbeda dengan yang akan diteliti, penelitian terdahulu meneliti Kurikulum Muatan Lokal Ta'limul Qur'an Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Banjar sementara penelitian yang akan diteliti ini ialah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan buah dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009. Begitu juga adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Kedua, Tesis Saudari Zainap Hartati dengan judul: *Efektivitas Penerapan Metode Iqra' dalam Belajar Membaca Al-Qur'an (Studi pada Taman Kanak-kanak Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palangka Raya)*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran efektivitas penerapan metode Iqra' dalam belajar membaca Al-Qur'an pada KMB di TKA Kota Palangka Raya dengan mengkategorikan TKA pada 3 (tiga) kategori yaitu: 1) TKA BKPRMI yang berkategori baik; 2) TKA BKPRMI yang berkategori cukup baik; dan 3) TKA BKPRMI yang berkategori kurang baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang Al-Qur'an, namun adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Ketiga, Tesis Saudara Jasmani yang berjudul: *Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Madrasah Ibtidaiyah (Studi Kasus di MIN Pahandut Palangka Raya)*. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan, pendapat dan setting ditetapkan dan diberlakukannya Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris di MIN Pahandut, (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan kegiatan penyusunan model kurikulum GBPP Muatan Lokal Bahasa Inggris, (3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris sekaligus tingkat keberhasilannya, (4) untuk mengetahui dan

mendeskripsikan kegiatan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum muatan lokal, dan (5) untuk mengetahui komponen-komponen Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris yang dievaluasikan dan disempurnakan. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini ialah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya *case and field* dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sementara analisis data yang digunakan ialah analisis *interactive* dengan langkah-langkah: (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3) *display* data, dan (4) verifikasi data. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang kurikulum muatan lokal namun adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Keempat, Skripsi Dewi Masyrifah yang berjudul: *Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan*. Tujuan penelitian ini ialah (1) untuk mendeskripsikan proses penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan, (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan. Penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang telah didapat sehingga akan

menggambarkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang kurikulum muatan lokal Al-Qur'an namun adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Kelima, Skripsi Nur Dela Laluhun yang berjudul: *Manajemen Kurikulum di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ikhlash Tempel Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta*. Latar belakang penelitian ini bahwa kurikulum merupakan landasan dalam setiap lembaga pendidikan baik lembaga formal maupun lembaga nonformal, fenomena saat ini yang ada lembaga nonformal khususnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (selanjutnya disingkat TPA) masih banyak yang belum memiliki kurikulum. Namun di TPA Al-Ikhlash justru sudah memiliki kurikulum yang dapat dijadikan pijakan oleh para *Ustadz-Ustadzah* untuk mencapai tujuan pembelajaran, oleh karena itu menarik untuk diteliti tentang manajemen kurikulumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun yang menghambat manajemen kurikulum TPA Al-Ikhlash. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengambil lokasi TPA Al-Ikhlash Tempel Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan manajemen pendidikan. Metode pengumpulan data dengan mengadakan observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Manajemen Kurikulum di TPA Al-Ikhlash dilaksanakan dengan cara Penyusunan Rencana Pembelajaran, meliputi menyusun kalender pendidikan, menyusun jadwal kegiatan belajar, membuat Silabus dan RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: *Pertama*, Pengelompokan kegiatan belajar mengajar mencakup tiga kelompok, kegiatan pra pembelajaran kelas, kegiatan pembelajaran kelas dan shalat berjamaah. *Kedua*, Proses kegiatan pembelajaran kelas ada tiga tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan tahap ini ada pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar peserta didik. 2) Hasil Pelaksanaan Kurikulum di TPA Al-Ikhlash dapat dilihat melalui ketercapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang diwujudkan dalam bentuk angka yang tertera dalam raport atau rekapitulasi nilai. 3) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan berupa lingkungan, *Ustadz-ustadzah*, *santri* dan buku pedoman. Adapun faktor penghambat meliputi *santri*, dana dan sarana prasarana. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang kurikulum Pendidikan Al-Qur'an namun adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Keenam, Tesis Saudara Rahmadi yang berjudul: *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 4 Paringin dan*

SMPN 1 Lampihong Kabupaten Balangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 4 Paringin dan SMPN 1 Lampihong Kabupaten Balangan baik aspek perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta mengkaji tentang faktor pendukung dan penghambat kegiatan implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 4 Paringin dan SMPN 1 Lampihong Kabupaten Balangan. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan fenomenology dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Keterkaitan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti ialah sama-sama meneliti tentang kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan bagian dari peraturan daerah, namun penelitian terdahulu ini mengarahkan penelitian kepada implementasinya sementara penelitian yang akan diteliti ini ialah mengarahkan kepada gagasan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan buah dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009. Begitu juga adanya perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu merupakan penelitian bersifat lapangan sementara penelitian ini termasuk dalam kelompok kepustakaan.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan terdahulu semuanya ada keterkaitan, penelitian terdahulu merupakan penelitian yang bersifat kualitatif hanya mengarah pada aspek implementasi pengembangan kurikulum ke dalam proses pembelajaran, belum ada penelitian kepustakaan yang mengarah

pada aspek gagasan isi kurikulumnya khususnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana gagasan kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan bagaimana isi dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an dan bagaimana analisis isi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan dokumen kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an. Karena gagasan-gagasan tersebut merupakan gagasan tentang kurikulum, maka analisisnya diarahkan ke dalam pendidikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁸ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.²⁹

²⁸Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang pendidikan, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas pendidikan khususnya yang berhubungan dengan kurikulum Pendidikan Islam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁰ Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu³¹ Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut '*Legal Research*' atau '*Legal*

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

³¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

Research Instruction".³² Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁴ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.³⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dan Peraturan Gubernur

³² Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 23.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), h. 46

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 300.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, h. 113.

Nomor 038 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 di Kalimantan Selatan. Selain itu juga meneliti dokumen kurikulum Pendidikan Al-Qur'an sebagai pelahiran dari kedua peraturan tersebut.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³⁷ Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Al-Qur'an
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Al-Qur'an

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang membahas tentang kurikulum Pendidikan Al-Qur'an.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁸

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar. Selain itu wawancara bisa dilakukan jika diperlukan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dimulai dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber hukum, pemegang hak cipta dan urutan rumusan masalah.

Tahapan berikutnya adalah *reconstructing* bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah tahapan *reconstructing* makalangkah terakhir adalah *systematizing* yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁹

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diadakan analisis bahan hukum dengan teknik *Content Analysis* yaitu metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini mempergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, h. 126.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203.

BAB I: Pendahuluan merupakan bab pembuka yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Peraturan Daerah, Kurikulum Pendidikan Islam, Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan Al-Qur'an meliputi Peraturan Daerah, Kurikulum Pendidikan Islam, Kurikulum Muatan Lokal, dan Pendidikan Al-Qur'an

BAB III: Gagasan Kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan meliputi: Dasar, Tujuan, Isi dan Struktur Program atau Materi, Media dan Sarana Prasarana, Strategi Belajar Mengajar, Proses Belajar Mengajar, dan Evaluasi atau Penilaian.

BAB IV: Analisis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Dokumen Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an meliputi: Tujuan Pendidikan Al-Qur'an, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Atas, dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Dasar

BAB V: Penutup, yang merupakan uraian Penutup berupa Simpulan, Saran-saran dan Rekomendasi